

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011-2022)

Apriediya Pradigma Sirestu

NPP. 30.1073

Asdaf Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: apridyapradigmasirestu@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri, S.E., M.Si., M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Issues related to regional financial management in Sumbawa Regency are very important, because regional financial capacity and independence are still relatively low and concerning. Considering that regional finance is used as financing for regional development. **Purpose:** the purpose of this study was to examine and analyze the influence between regional financial capacity and independence and its effect on economic growth in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, for the 2011-2022 fiscal year. **Method:** The method used by the authors in this study is descriptive quantitative with multiple linear regression, in which the authors calculate the value of the ratio of regional financial capabilities and independence which is also the data analysis technique used then describes the results obtained after that the authors look at the effect on economic growth during the last twelve years, namely 2011-2022 through the SPSS 25 application. As this research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency, Sumbawa Regency. **Result:** Based on the results of this study, the value of the regional financial capacity ratio in Sumbawa Regency for the last twelve years, namely in 2011-2022, is still low, with the lowest regional financial capability ratio calculation results in 2016, namely 8.850% and the highest in 2017, 14.897%. Then the regional financial independence of Sumbawa Regency for the last twelve years is still classified as instructive with the highest ratio in 2017 of 18.281% and the lowest in 2012 of 8.803%. Based on the results of the partial test between regional financial capacity on economic growth and regional financial independence on economic growth it is proven that it has an effect on the t test conducted. Meanwhile, through the F or simultaneous test it also shows that the independent variable on the dependent variable has an influence as well as a coefficient of determination of 93.8%. **Conclusion:** Based on the partial test of variables between regional financial capacity (X1) on economic growth (Y) it is proven to have an effect, and between regional financial independence (X2)

on economic growth (Y) also has a positive effect and simultaneously between regional financial capabilities (X1) and regional financial independence (X2) on economic growth (Y) has a positive and significant effect.

Keywords: Ability, Independence, Regional Finance, Economy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa menjadi suatu hal yang sangat penting, karena kemampuan dan kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dan memprihatinkan. Mengingat keuangan daerah digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2011-2022. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan regresi linier berganda, dimana penulis menghitung besarnya nilai rasio kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang sekaligus menjadi teknik analisis data yang digunakan kemudian mendeskripsikan hasil yang diperoleh setelah itu penulis melihat pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi selama dua belas tahun terakhir yaitu 2011-2022 melalui aplikasi SPSS 25. Sebagaimana penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai dari rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir yaitu pada tahun 2011-2022 tergolong masih rendah dengan hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah terendah pada tahun 2016 yaitu 8,850% dan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 14,897%. Kemudian Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir masih tergolong instruktif dengan rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 18,281% dan terendah tahun 2012 sebesar 8,803%. Berdasarkan hasil uji parsial antara kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh atas uji t yang dilakukan. Sedangkan melalui uji F atau simultan juga memperlihatkan bahwa variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh serta dengan nilai koefisien determinasi sebesar 93,8%. **Kesimpulan:** Berdasarkan uji variabel secara parsial antara kemampuan keuangan daerah (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) terbukti berpengaruh, dan antara kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) juga berpengaruh positif serta secara simultan antara kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Kemampuan, Kemandirian, Keuangan Daerah, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian pemerintahan daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang merupakan tingkat kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan, kemakmuran dan kemajuan ekonomi serta perubahan yang fundamental (Hera dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implementasi dari adanya Undang-Undang tersebut, menjadikan pemerintah daerah sebagai pemeran penting untuk pelaksanaan pembangunan di daerah terutama dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh atas keadaan perekonomian di daerahnya.

Keberhasilan keuangan merupakan indikator penting dalam rangka terselenggaranya pemerintah daerah. Semakin besar pengelolaan atas potensi yang dimiliki pemerintah daerah maka, akan semakin besar juga peluang pendapatan yang akan dihasilkan. Ciri utama suatu daerah dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi di daerahnya terlihat pada kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah (R. Agoes Kamaroellah, 2017). Kemampuan daerah dalam hal ini memiliki arti bahwa bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber potensi yang ada sehingga menjadi pendapatan daerah dan dapat mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi kriteria dalam mendukung hal tersebut yaitu melalui *self-supporting* di bidang keuangan.

Kemandirian menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pihak eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi akan semakin rendah (Ramli Faud, 2016:32). Keuangan pemerintah daerah yang mandiri dan pengelolaannya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang berguna sebagai pengambilan keputusan dalam hal pembangunan,

melalui APBD juga dapat diketahui apakah suatu daerah bisa melaksanakan pembangunannya dengan akuntabel dan mengedepankan transparansi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik akan diikuti dengan terpenuhinya pembiayaan pembangunan pemerintah daerah yang salah satunya dapat dilihat dari kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua hak yang diterima daerah melalui pungutan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai potensi yang sangat beragam mulai dari pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, karena PAD juga merupakan indikator pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah otonom. Pembangunan di daerah Kabupaten Sumbawa memerlukan biaya yang tidak sedikit hingga bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam rangka memenuhi pengeluaran pemerintah daerah, membuat Kabupaten Sumbawa perlu menggunakan sumber potensi daerah yang tersedia sehingga, tidak secara penuh mengandalkan dana dari pemerintah pusat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Sumbawa mengalami kondisi yang fluktuatif terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggambarkan kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya dengan rincian pada tahun 2011 sebesar Rp 89,06 M, tahun 2012 sebesar Rp 61,26 M, tahun 2013 sebesar Rp 67,87 M, di tahun 2014 sebesar Rp 126,13 M, tahun 2015 sebesar Rp 133,97, tahun 2016 sebesar 135,09, tahun 2017 sebesar 249,53, tahun 2018 sebesar Rp 143,94 M, tahun 2019 sebesar Rp 163,93 M, tahun 2020 sebesar Rp 181,31 M, pada tahun 2021 sebesar Rp 202,86 M dan pada tahun 2022 sebesar Rp 163,15 M.

Rata-rata kenaikan PAD Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir yaitu sebesar Rp 166,66 M. Peningkatan PAD ini dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor-sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa seperti pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Seiring dengan meningkatnya penerimaan PAD membuktikan bahwa PAD Kabupaten Sumbawa akan memiliki peluang terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Terlihat PAD Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

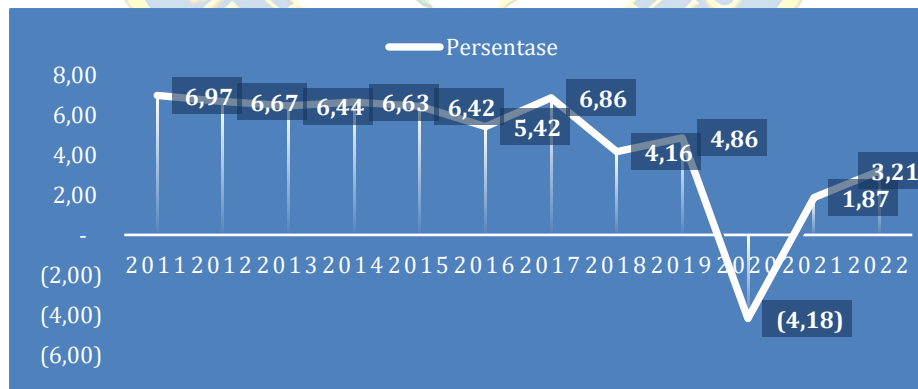
Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2022
(Dalam Miliaran Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Tahun											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	10,56	12,08	14,04	19,86	20,80	23,44	28,82	35,59	37,54	31,83	36,26	42,87
2	Retribusi Daerah	14,46	26,97	28,98	61,50	14,90	13,66	17,32	17,90	10,51	8,50	8,56	9,33
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	56,41	10,93	13,63	16,73	19,65	20,10	67,04	14,18	11,75	13,06	9,91	11,02
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7,63	11,27	11,21	28,04	78,62	77,89	136,35	76,28	104,14	127,91	148,13	99,93
	Jumlah PAD	89,06	61,26	67,87	126,13	133,97	135,09	249,53	143,95	163,94	181,30	202,86	163,15

Sumber: DJPK. Kementerian Keuangan (2022)

Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi, merupakan perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian akan menggambarkan seberapa besar pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, namun dalam hal ini, ada banyak dari indikator yang mempengaruhi perekonomian daerah, misalnya pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir Kabupaten Sumbawa terhitung dari tahun 2011-2022, terkait dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi tergambar dalam gambar grafik di bawah ini.

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2022)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi setiap tahun ternyata tidak dibarengi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa, yang mana dengan PAD yang terus meningkat setiap

tahunnya namun diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat. Maka dari itu, Kabupaten Sumbawa masih harus dipertanyakan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerahnya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tercermin didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa pada tahun yang sudah terealisasi. Sedangkan, dalam rangka mengukur pertumbuhannya dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap harga berlaku pada Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa sebagai tahap lanjutan dari pendapatan daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 serta melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang bersangkutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam segi konteks untuk melihat seberapa besar hubungan antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2022. Penelitian Mutia Ayustin berjudul Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat), menemukan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori masih rendah, dengan kemandirian keuangan terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan presentase 52,4%. Sedangkan yang tertinggi sebesar 536,09% pada Kota Sukabumi dan terdapat pengaruh positif signifikan sebesar 0,263 antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan dan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 0,354.

Penelitian Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami dan Rr Retno Sugiharti yang berjudul Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah, menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah sebagian besar berada pada kategori sangat kurang dan kemandirian keuangan daerahnya dalam kategori instruktif serta kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan antara kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan sebesar -1.2541 (Jalu Aji dkk, 2019). Penelitian Choirel Woestho, Ari Sulistyowati dan Rycha Kuwara Sari yang berjudul Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto, menemukan bahwa Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto masih sangat kecil dan kemandirian keuangan daerahnya rendah sekali dengan rentan 0-25% dengan jenis hubungan instruktif serta kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan sebesar -3,080 terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 2,471 (Choirel Woestho dkk., 2020).

Penelitian Neya Arafah, Sunaryo Neneng dan Karmen Marpaung yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, menemukan bahwa Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk kategori rendah dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan sebesar 0,508 terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan antara kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan sebesar -3,660. Penelitian Milda Handayani, Rycha Kuwara Sari dan Ari Sulistyowati, yang berjudul Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor, menemukan bahwa Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bogor dalam kategori rendah sekali dengan pola instruktif dan Kemampuan keuangan daerahnya berada pada kategori cukup serta kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh positif sebesar 0,295 dan kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif sebesar -0,171 terhadap penduduk miskin. Selanjutnya, penelitian oleh Silvia Karenina, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya dan Mohammad Wasil menemukan bahwa Kemandirian keuangan memperoleh rata-rata sebesar 11,69% dengan pola hubungan instruktif dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,912.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan variabel kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi selama rentan waktu 12 tahun yaitu dari tahun 2011-2022, serta untuk pertumbuhan ekonominya penulis menggunakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Penulis menggunakan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena menurut penulis PDRB atas harga konstan lebih cocok digunakan dalam penelitian *time series*. Tahun penelitian yang digunakan juga merupakan tahun terbaru dengan memasukkan tahun 2022 dan terlama dari penelitian sebelumnya, karena mengambil 12 tahun anggaran.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2011-2022.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda dengan data sekunder, Ramdhan (2021:6) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan sebuah investigasi sistematis mengenai fenomena-fenomena tertentu dengan menggunakan data yang dapat diukur melalui teknik statistik, matematika atau komputasi.

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data laporan keuangan dan ekonomi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2022. Data laporan keuangan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa. Data laporan yang diperlukan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit dan data pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan alat bantu *software* berbentuk aplikasi statistik (aplikasi SPSS) dalam menghitung data dalam penelitian, dalam penelitian kuantitatif ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

3.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Kemampuan keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal) yaitu tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah ataupun pembiayaan lainnya. Adapun kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Jalu Aji dkk (2019)

Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan rumus dari teori Jalu Aji dkk selama sembilan tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.

Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011-2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Miliar Rupiah))	Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Kemampuan Keuangan (DDF (%))	Pola Hubungan
1	2011	89,06	837,18	10,638	Kurang
2	2012	61,26	876,19	6,992	Sangat Kurang
3	2013	67,87	955,35	7,104	Sangat Kurang
4	2014	126,13	1.154,66	10,924	Kurang
5	2015	133,97	1.305,14	10,265	Kurang

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD(Miliar Rupiah))	Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Kemampuan Keuangan (DDF (%))	Pola Hubungan
6	2016	135,09	1.526,36	8,850	Sangat Kurang
7	2017	249,53	1.675,06	14,897	Kurang
8	2018	143,95	1.604,62	8,971	Sangat Kurang
9	2019	163,93	1.782,26	9,198	Sangat Kurang
10	2020	181,31	1.630,12	11,123	Kurang
11	2021	202,86	1.641,09	12,361	Kurang
12	2022	163,15	1.675,68	9,736	Sangat Kurang

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah, 2023)

Perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2022 terlihat mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Pada tahun tahun 2011 nilai rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mencapai 10,638%, tahun 2012 sebesar 6,992%, tahun 2013 mencapai 7,104%, di tahun 2014 nilai rasionya sebesar 10,924%, tahun 2015 sebesar 10,265%, tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 8,850%, namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 14,897%, di tahun 2018 dengan nilai rasio sebesar 8,971% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,227%, sehingga nilai rasionya menjadi 9,198%.

Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 1,925% sehingga memiliki rasio sebesar 11,123%, selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,239% sehingga nilai rasio pada tahun 2021 adalah sebesar 12,361% dan di tahun 2022 nilai rasionya Kembali turun hingga mencapai 9,736%. Namun, jika dikaitkan dengan skala interval atau pola hubungan dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, sesuai yang dikemukakan oleh Jalu Aji dkk (2019) maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat diklasifikasikan menurut interval yang telah ditentukan.

Pada tahun 2011 dengan nilai rasio 10,638 termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang, tahun 2012 sebesar 6,992% termasuk dalam interval 00,01-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang, di tahun 2013 dengan rasio sebesar 7,104% termasuk dalam interval 00,01-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang, tahun 2014 dengan rasio sebesar 10,924% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang, selanjutnya di tahun 2015 dengan rasio sebesar 10,265% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang, di tahun 2016 dengan nilai rasio 8,971% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang, di tahun 2017 sebesar 14,897% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang dan di tahun 2018 dengan rasio sebesar 8,971% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola

hubungan sangat kurang, selanjutnya pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 9,198% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang.

Pada tahun 2020 yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terlihat bahwa dari nilai rasionya mengalami peningkatan pola hubungan dari sangat kurang menjadi kurang dengan rasio sebesar 11,123% yang masuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang. Selanjutnya pada tahun 2021 dengan rasio 12,361% termasuk dalam interval 10,01-20,00 dengan pola hubungan kurang dan tahun 2022 sebesar 9,736% termasuk dalam interval 0,00-10,00 dengan pola hubungan sangat kurang.

3.2 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan (Derajat Otonomi Fiskal) daerah digunakan untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat diluar bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi (Syafnita, 2021). Adapun kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Sumber: Amrie Firmansyah dkk(2015:227)

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan rumus dari teori Amrie Firmansyah dkk dari tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011-2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Kemandirian Keuangan (DDF(%))	Pola Hubungan
1	2011	89,06	604,19	14,740	Instruktif
2	2012	61,26	695,86	8,803	Instruktif
3	2013	67,87	770,93	8,804	Instruktif
4	2014	126,13	845,16	14,924	Instruktif
5	2015	133,97	916,58	14,616	Instruktif
6	2016	135,09	1.345,87	10,037	Instruktif
7	2017	249,53	1.364,98	18,281	Instruktif
8	2018	143,94	1.401,66	10,269	Instruktif
9	2019	163,93	1.553,68	10,551	Instruktif
10	2020	181,31	1.229,28	14,749	Instruktif
11	2021	202,86	1.363,71	14,875	Instruktif
12	2022	163,15	1.406,83	11,597	Instruktif

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah, 2023)

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa terlihat bahwa angka rasio cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2011 nilai rasionya sebesar 14,740%, tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,803%, tahun 2013 sebesar 8,804%, tahun 2014 nilai rasionya sebesar 14,924%, tahun 2015 sebesar 14,616%, di tahun 2016 sebesar turun menjadi 10,037%, tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,281%, tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 10,269%, dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 0,282% sehingga nilai rasio kemandirian keuangan daerahnya menjadi 10,551%. Pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan sebesar 4,198% sehingga pada tahun 2020 nilai rasionya sebesar 14,749% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,126% dengan nilai rasio menjadi 14,875% serta di tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 11,597%.

Skala interval dari pengklasifikasian nilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011-2022 memiliki klasifikasi skala interval yang sama yaitu termasuk dalam skala interval 0-25 dengan pola hubungan yang instruktif. Randria Ramadhani (2016) menjelaskan bahwa pola hubungan instruktif ini adalah pola hubungan yang memperlihatkan keterkaitan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat tinggi dibuktikan dengan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang mana masih bergantung pada bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh kegiatan unit ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah terhadap harga berlaku. Nilai PDRB memiliki kaitan yang erat dengan pendapatan per kapita masyarakat dan nilai PDRB dapat digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, PDRB yang digunakan dalam melihat pengaruh antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini yaitu PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2022. Menghitung persentase dari pertumbuhan ekonomi melalui perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan dengan metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{it-1}}{PDRB_{it-1}} \times 100\%$$

Sumber: Woestho dkk., 2020

Keterangan:

Yit = Pertumbuhan Ekonomi

PDRBit = Produk Domestik Regional Bruto tahun i

PDRBit-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun i - 1

Adapun nilai PDRB atas harga konstan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011-2022 dalam bentuk persentase dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa
Tahun 2011-2022

NO	KATEGORI	TAHUN											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,2	7,2	6,2	6,3	6,8	3,4	7,3	4,32	2,01	-0,82	1,32	-4,0
2	Pertambangan dan Penggalian	5,2	6,7	6,5	6,7	6,6	7,9	5,6	3,70	8,90	-7,61	1,73	38,2
3	Industri Pengolahan	32	5,7	4,6	6,3	2,6	0,4	6,9	3,06	3,58	-0,85	1,30	2,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,8	14,6	18,9	4,9	3,6	10,2	3,6	2,45	19,60	12,45	8,91	6,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,5	4,8	4,9	3,95	0,4	4,1	2,1	-1,26	0,62	0,28	0,43	2,5
6	Konstruksi	5,8	3,8	5,9	7,3	0,7	7	6,5	2,22	11,93	-18,83	5,31	289,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,9	8,9	8,6	8,5	5,3	7,6	9,2	5,49	6,45	-2,86	1,24	4,4
8	Transportasi dan Pergudangan	10,2	5,1	5,4	5,4	0,7	5,6	6,7	4,08	3,88	-29,56	0,59	13,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	6,4	6,7	7,2	5,2	7,7	7,3	0,94	2,69	-18,63	0,42	22,9
10	Informasi dan Komunikasi	9,5	13,5	8,7	9,9	9,4	8,4	8,7	5,93	4,13	10,79	4,26	3,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,9	13	7,8	8,3	0,9	12,3	11,4	7,53	1,40	6,42	0,94	5,1
12	Real Estat	5,7	4,3	4,1	6,3	0,6	5,8	0,6	4,21	2,94	0,72	1,18	0,8
13	Jasa Perusahaan	7,8	6,2	6,2	7,3	0,5	6,6	5,6	5,10	4,71	1,46	0,39	6,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,5	2,9	3,1	3,4	0,3	2,3	2,67	1,15	3,76	2,83	1,33	916,8
15	Jasa Pendidikan	7,8	6,8	7	6,9	7,1	6,6	6,9	5,56	6,10	0,49	1,16	2,1
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	52	51	7,7	25	6,9	6,1	5	995,21	6,84	-0,10	4,35	5,0
17	Jasa Lainnya	8,1	7,1	6,4	7,4	0,6	6	6,8	5,23	6,16	-5,31	1,13	11,9
	JUMLAH	6,97	6,44	6,63	6,21	5,42	6,86	4,16	4,86	-4,18	1,87	3,21	1.326,2

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Diolah Penulis, 2023)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa selama dua belas tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2022 yang diukur dan dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Harga konstan dipergunakan di dalam penelitian karena PDRB atas harga konstan merupakan pengukuran PDRB melalui tahun dasar tertentu. PDRB atas harga konstan dipergunakan untuk melihat suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah setiap tahunnya dan PDRB atas harga konstan lebih cocok dijadikan data penelitian *time series* dalam melihat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan tiga variabel yaitu variabel independent terdiri atas kemampuan keuangan daerah (X1), kemandirian keuangan daerah (X2) dan pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen. Masing-masing pengaruh antar variabel akan dilihat melalui pengujian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menghitung rasio terlebih dahulu dan diinput dalam aplikasi SPSS.

3.4 Hasil Uji menggunakan Aplikasi SPSS

3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno (2018:127) ada beberapa yang dapat digunakan untuk uji normalitas diantaranya P-P Plot Of Regression Standardized residual atau melalui uji One Sample Kolmogorov Smirnov. One Sample Kolmogorov Smirnov dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($> 0,05$) maka nilai residual dari data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,13594509
Most Extreme Differences	Absolute	,208
	Positive	,166
	Negative	-,208
Test Statistic		,208
Asymp. Sig. (2-tailed)		,158 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* terlihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,158, berdasarkan pengambilan keputusannya bahwa apabila nilai

signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka nilai residual dari data dapat dikatakan berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi didalam model penelitian yang dilakukan. Uji yang digunakan yaitu dengan cara melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF). Priyatno (2018:134), menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dari uji ini yaitu dengan memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 (<10) dan memiliki angka Tolerance lebih dari 10 (>10) maka tidak terdapat unsur multikolinearitas. Adapun hasil uji unsur multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,323	4,965		1,475	,174		
	Kemampuan Keuangan Daerah	-,646	1,462	-,442	-,442	,669	,107	9,352
	Kemandirian Keuangan Daerah	,299	1,049	,284	,285	,782	,107	9,352

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada data penelitian ini dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 9,352 atau kurang dari 10 (<10) maka tidak terdapat unsur multikolinearitas dalam model.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk uji ini diantaranya uji glejser dan scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu untuk uji glejser apabila nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Duwi Priyatno, 2018:136).

Adapun hasil uji unsur heteroskedastisitas dengan uji glejser pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk uji ini diantaranya uji glejser dan scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu untuk uji glejser apabila nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Duwi Priyatno, 2018:136). Adapun hasil uji unsur heteroskedastisitas dengan uji glejser pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 7.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,344	3,076		-,762	,465		
	Kemampuan Keuangan Daerah	-,336	,906	-,321	-,371	,719	,107	9,352
	Kemandirian Keuangan Daerah	,614	,650	,819	,944	,370	,107	9,352

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian telah diperoleh hasil nilai signifikansi untuk kemampuan keuangan daerah (X1) sebesar 0.719 dan untuk kemandirian keuangan daerah (X2) sebesar 0.370. Nilai tersebut lebih dari 0,05 (>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada ataupun tidaknya pengaruh signifikan yang terjadi secara parsial ataupun simultan antara dua ataupun lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Duwi Priyatno, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Adapun hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 8.

Hasil Uji Regresi Berganda (X1 dan X2 terhadap Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,323	4,965		1,475	,174
	Kemampuan Keuangan Daerah	,646	1,462	-,442	-,442	,669
	Kemandirian Keuangan Daerah	,299	1,049	,284	,285	,782

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dari SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 7,323 + 0,646(X1) + 0,299(X2)$$

Hasil dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 7,323 atau 73,23%. Hal ini berarti bahwa pada saat variabel independen atau kemampuan keuangan daerah (X1) dan kemandirian keuangan daerah (X2) sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) tetap naik sebesar 73,23%.

3.3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan hasil dari regresi dengan t tabel untuk uji parsial dan membandingkan hasil regresi dengan f tabel untuk pengujian simultan.

1. Kemampuan Keuangan Daerah (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 9.
Hasil Uji t Variabel X₁

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,593	,190		24,156	,000
	Kemampuan Keuangan Daerah	1,000	,063	,981	15,790	,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Kriteria pengujiannya adalah hipotesis satu dapat diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis satu ditolak dan hipotesis nol diterima. Berdasarkan perhitungan output hasil SPSS di atas maka diperoleh t_{hitung} sebesar 15,790 dan t_{tabel} yang diperoleh dengan

$$t_{tabel} = t(a/2 : n-k-1)$$

$$a = 5\% \quad = t(0,05/2 : 36-3-1)$$

$$= t(0,025 : 32)$$

$$= t(2.03693)$$

Berdasarkan hasil perhitungan t_{tabel} di atas, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2.036 dan terlihat pada tabel tersebut bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai t_{hitung} sebesar 15,790. Jadi dengan nilai 15,790 lebih besar (>) dari 2,036 sehingga dalam pengujian ini H nol ditolak dan H satu diterima serta untuk nilai signifikansinya adalah 0.000 atau lebih kecil dari (<) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah (X₁) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hipotesis Pertama

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya X_1 (Kemampuan Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya X_1 (Kemampuan Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Diterima.**

2. Kemandirian Keuangan Daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 10.
Hasil Uji t Variabel X2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,716	,900		7,466	,000
	RES2	-1,031	,300	-,736	3,443	,006

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan perhitungan output hasil SPSS di atas maka diperoleh t_{hitung} sebesar 3.443 dan t_{tabel} yang diperoleh dengan derajat kebebasan sebesar 32 dan tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai yaitu 2.036. Jadi dengan nilai $3.443 > 2.036$ sehingga dalam pengujian ini H_0 ditolak dan H_1 diterima serta untuk nilai signifikansinya adalah 0.006 atau lebih kecil dari ($<$) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hipotesis Kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, artinya X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Diterima.**

3. Kemampuan Keuangan Daerah (X1) dan Kemandirian Keuangan Daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 11.
Hasil Uji F Variabel Independen X1 dan X2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,657	2	32,329	6,080	,021 ^b
	Residual	47,857	9	5,317		
	Total	112,514	11			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
b. Predictors: (Constant), Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Adapun rumus untuk mengetahui F_{tabel} menurut Rohmah & Ashlihah (2021) adalah $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$, dimana nilai dari k ini merupakan jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel. Jika mengikuti persamaan tersebut maka dalam penelitian ini $df1 = 3 - 1 = 2$, dan $df2 = 36 - 3 = 33$. Maka nilai F_{tabel} pada penelitian ini adalah 3,28.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,080 dan nilai signifikansi sebesar 0.021. Nilai dari F_{hitung} yaitu sebesar 6,080 lebih besar ($>$) daripada F_{tabel} yaitu 3,28 ($6,080 > 3,28$) dan nilai signifikansinya adalah 0.021 lebih kecil ($<$) daripada 0.05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hipotesis Ketiga

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya X_1 (Kemampuan Keuangan Daerah) dan X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Ditolak.**

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, artinya X_1 (Kemampuan Keuangan Daerah) dan X_2 (Kemandirian Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). **Diterima.**

3.3.6 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Woestho dkk (2020) menjelaskan bahwa suatu nilai koefisien determinasi akan menunjukkan seberapa besar dari kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen dalam penelitian. Horas Veryady (2019:124), bahwa rumus untuk menghitung besaran dari nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

$$R^2 \times 100\%$$

Adapun hasil dari perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 12.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,969 ^a	,938	,989	,32878	,991	515,936	2	9	,000

a. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual, Kemampuan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Uji menggunakan SPSS

Berdasarkan dari hasil uji SPSS di atas, bahwa nilai dari koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut.

$$0.969^2 \times 100\% = (0.969)^2 \times 100\% = 0.938 \times 100\% = 93,8\%$$

Hasil dari perhitungan koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa antara variabel independen yaitu kemampuan keuangan daerah (X_1) dan kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen memiliki kontribusi sebesar 93,8%. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan jika nilai dari koefisien determinasinya lebih besar dari ($>$) 0,50 atau 50%, dapat dikatakan hasil ketepatan nilai dari koefisiennya tergolong tinggi.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi nilai koefisien determinasi pada variabel independen (Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah) dan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki hubungan yang kuat dan searah. Hal ini juga menunjukkan bahwa $100 - 93,8 = 6,2$ maka 6,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar daripada variabel independen dalam penelitian ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada penelitian sebelumnya maka dengan variabel yang sama yaitu kemampuan keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Jalu Aji Prakoso dkk (2019) dengan judul “Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah”, dimana hasil yang didapatkan yaitu kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah sebagian besar berada pada kategori sangat kurang dengan Kabupaten terendah yaitu Kabupaten Klaten dengan hasil rasio 5,626% dan untuk yang tertinggi yaitu Kabupaten Semarang dengan hasil rata-rata sebesar 13,124%. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini, untuk Kabupaten Sumbawa dengan kemampuan keuangan daerah juga tergolong masih kurang, kemampuan keuangan daerah terendah yaitu pada tahun 2017 dengan hasil 8,850% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan hasil 14,897%. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan variabel yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu kemampuan keuangan daerah, nilai dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa ini masih memiliki hasil yang sama dalam kategori kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah yang mana masih tergolong rendah.

Hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada penelitian sebelumnya maka dengan variabel yang sama yaitu kemandirian keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ayustin (2018) dengan judul “Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat)”, dimana hasil yang didapatkan yaitu rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori masih rendah, dengan kemandirian keuangan terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan persentase 52,4%. Sedangkan yang tertinggi sebesar 536,09%. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini, untuk Kabupaten Sumbawa dengan kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih rendah pola hubungan instruktif, kemandirian keuangan daerah tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan hasil 18,281% dan terendah pada tahun 2016 dengan hasil 10,037%. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan variabel yang sama dengan penelitian terdahulu, nilai dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa ini masih memiliki kesenjangan yang jauh dengan daerah lainnya.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yaitu berkaitan erat dengan tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, PAD akan menentukan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa terutama dalam rangka membiayai pembangunan daerah. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi ada banyak indikator dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa selain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Selain itu, ada PDRB atas harga berlaku, pendapatan nasional dan modal. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah maka akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara kemampuan keuangan daerah sebagai variabel independen (X1) terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini berarti bahwa Ketika kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan maka, akan diikuti dengan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada hasil uji t yang dilakukan yaitu $t_{hitung} 15,790 > t_{tabel} 2,036$ dan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara kemandirian keuangan daerah sebagai

variabel independen (X2) terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini berarti bahwa Ketika kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan maka, akan diikuti dengan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada hasil uji t yang dilakukan yaitu $t_{hitung} 3.443 > t_{tabel} 2,036$ dan nilai sig. $0.006 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H2 yang menyatakan bahwa “Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang dilakukan yaitu $t_{hitung} 6,080 > t_{tabel} 3,28$ dan nilai sig. $0.021 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H3 yang menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya. Pengaruh variabel tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian ini, mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terkait dengan adanya keterbatasan dalam memperoleh data sekunder, dimana peneliti hanya memperoleh sebanyak 12 tahun yaitu dari tahun 2011-2022, namun diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara mempertimbangkan berbagai variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data atau referensi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas dan untuk tahun yang dijadikan sampel dalam penelitian agar lebih banyak dari dua belas tahun untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada 1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, MM selaku Ketua Prodi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Tun Huseno, M.Si selaku Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat dan Dosen Pembimbing Ibu Jatnika Dwi Asri, S.E., M.Si., M.Ak serta

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Amrie Firmansyah, Mariana Dyah, Marmah Hadi, Doddy H, T. (2015). Modul Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Duwi Priyatno. (2018). SPSS:Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum. CV Andi Offset.

Jan Horas Veryady Purba. (2019). Belajar Mudah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Mitra Wacana Media.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014file:///D:/SKRIPSI/Jurnal/PP Nomor 12 Tahun 2019 (1).pdf (Nomor c).

Sumber Jurnal:

Aji, J. ... Sugiharti, R. R. (2019). Analysis Of Regional Financial Capability And Independence Toward Economic Growth And Poverty In Central Java. Riset Ekonomi Pembangunan, 4(1). <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>

Arafah, N. ... Marpaung, K. (2019). JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata Analisis kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten kotawaringin barat. Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata, 4(1), 87–100. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jepupr>

R. Agoes Kamaroellah. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 14(1), 124–138.

Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(1), 85. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3846>

Ramli Faud. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia.

Woestho, C. ... Ekonomi, P. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. In Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 6, Nomor 2).

Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik. (2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>

Usman, H. (2021). Target PAD 2021 Naik 10,6 Milyar. Mediasumbawa.com. <https://mediasumbawa.com/target-pad-2021-naik-106-milyar/>